

Sosialisasi Perumahan dan Permukiman Di Pulau Lombok Dalam Perspektif Desa Kota

¹Fariz Primadi Hirsan, ¹Febrita Susanti, ¹Baiq Harly Widayanti,

¹Ima Rahmawati Sushanti, ¹Ardi Yuniarman

¹Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota,
Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Email : fariz.primadi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 09-06-2025

Revised : 11-08-2025

Accepted : 13-08-2025

Online : 10-11-2025

Keywords:

Perumahan;

Permukiman;

Desa-Kota;

Sosialisasi



ABSTRACT

Abstract: Lombok Island faces rapid development with intense rural-urban interaction, causing land-use shifts and housing challenges. Communities in transitional areas often lack understanding of regulations, decent housing standards, and sustainable environmental management. This community engagement initiative aimed to enhance stakeholders' and community understanding of housing and settlement regulations from a rural-urban perspective, increase awareness of sustainable planning, and foster active government-community participation. The method involved a technical guidance participatory meeting at the West Nusa Tenggara Province Housing and Settlement Agency on April 15, 2025. Stages included an initial survey, interactive visual materials, pre-test, lectures, discussions, and a post-test. Evaluation results showed a significant understanding increase from 73.45% to 87.04% regarding rural-urban housing typologies. Critical issues identified were unplanned land conversion, difficulty accessing information/permitting, infrastructure disparities, and evolving housing aspirations. These findings highlight the need for an integrated approach to Lombok's settlement development

Abstrak: Pulau Lombok mengalami dinamika pembangunan pesat dengan interaksi "desa-kota" yang intens, memicu pergeseran fungsi lahan dan tantangan dalam pengembangan perumahan. Masyarakat di wilayah transisi seringkali kurang memahami regulasi, standar hunian layak, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat tentang regulasi serta standar perumahan dan permukiman dalam perspektif desa-kota, meningkatkan kesadaran perencanaan permukiman berkelanjutan, dan mendorong partisipasi pemerintah serta masyarakat. Metode yang digunakan adalah bimbingan teknis melalui pertemuan partisipatif di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB pada 15 April 2025. Tahapan mencakup survei awal, materi visual interaktif, *pre-test*, ceramah, diskusi, dan *post-test*. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari 73,45% menjadi 87,04% terkait tipologi perumahan desa-kota. Isu kritis yang teridentifikasi meliputi konversi lahan tak terencana, kesulitan akses informasi/izin, kesenjangan infrastruktur, dan perubahan aspirasi hunian. Ini mengindikasikan perlunya pendekatan terintegrasi dalam pembangunan permukiman di Pulau Lombok.



<https://doi.org/10.31764/justek.vXIY.ZZZ>



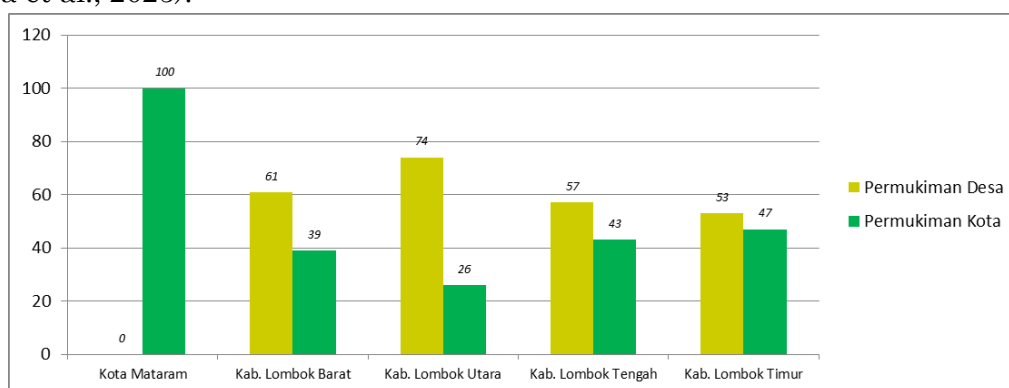
This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Pulau Lombok, sebagai salah satu destinasi pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mengalami dinamika pembangunan yang pesat (Primadianti & Sugiyanto, 2020). Peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk tidak hanya terpusat di wilayah inti perkotaan, tetapi juga meluas ke daerah-daerah penyangga perkotaan atau *peri-urban*, yang menciptakan fenomena yang dikenal sebagai interaksi "desa-kota" (Aframianti Naftali Papur et al., 2022). Fenomena ini ditandai dengan pergeseran fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian, peningkatan kepadatan bangunan, perubahan pola sosial ekonomi masyarakat, serta masuknya karakteristik perkotaan ke wilayah pedesaan (Pradana et al., 2021).

Berdasarkan data yang dihimpun dari masing-masing dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di masing-masing wilayah kabupaten dan kota yang ada di pulau Lombok, tercatat bahwa jumlah prosentase perbandingan antara permukiman pedesaan dan permukiman perkotaan, menunjukkan variasi pola yang berbeda dari masing-masing wilayah administrasi yang ada. Pola permukiman terjadi jika terdapat persebaran penduduk di suatu kota atau desa, yang menunjukkan bahwa antara pola dan persebaran saling terkait satu dengan yang lainnya (Farida Nurul Yusrina et al., 2018). Melihat data dan fakta tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa semakin lama, permukiman pedesaan akan semakin terdesak dan terkonversi menjadi permukiman perkotaan. Secara perlahan permukiman bergeser ke wilayah perkotaan sehingga persentase wilayah permukiman di pedesaan lambat laun ditinggalkan (Wijaya et al., 2025).



Gambar 1. Perbandingan antara permukiman pedesaan dan perkotaan di Pulau Lombok
(Sumber : Data dalam dokumen RTRW Kab./Kota se-Pulau Lombok)

Dalam konteks perumahan dan permukiman, perkembangan desa-kota ini seringkali diiringi dengan berbagai tantangan, terutama tantangan dalam pengembangan kawasan perumahan atau permukiman (Aulia Muflih Nasution, 2019). Masyarakat di wilayah "transisi" ini kerap kali belum sepenuhnya memahami regulasi terkait tata ruang (Simamora & Andrie Gusti Ari Sarjono, 2022) dan pembangunan (Izin Mendirikan Bangunan/IMB, Garis Sempadan Bangunan/GSB), standar hunian layak, serta pentingnya pengelolaan lingkungan permukiman yang berkelanjutan seperti sistem sanitasi, drainase, dan pengelolaan sampah yang memadai. Pengembangan kawasan permukiman dan perumahan, baik di wilayah desa maupun kota, seringkali dihadapkan pada serangkaian tantangan kompleks yang saling berkaitan (Dyah Nawang Wulan & Widodo, 2020). Salah satu isu utama adalah keterbatasan lahan dan

lonjakan harga tanah yang signifikan, terutama di perkotaan, menyulitkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak (Mas'odi Mas'odi et al., 2025), sementara di pedesaan, konversi lahan pertanian yang tidak terkendali mengancam ketahanan pangan (Dewinta & Warlina, 2017). Kondisi ini kemudian diperparah dengan munculnya permukiman kumuh yang padat dan tidak teratur di perkotaan (Sari & Ridlo, 2022), serta masih banyaknya perumahan tidak layak huni di pedesaan yang minim standar kelayakan dan fasilitas dasar. Ketidakmerataan akses terhadap infrastruktur esensial seperti air bersih, sanitasi yang memadai, sistem drainase yang baik, serta jalan yang layak, menjadi hambatan serius yang berdampak langsung pada kualitas hidup penghuni (Amir Abas & Deva Fosterharoldas Swasto, 2025). Di samping itu, masalah legalitas dan perizinan yang rumit seringkali menghambat pembangunan yang terencana dan menyebabkan banyak permukiman informal, sementara perencanaan tata ruang yang belum optimal atau tidak konsisten dalam implementasinya dapat mengakibatkan pembangunan yang tidak terkendali dan konflik penggunaan lahan (Simamora & Andrie Gusti Ari Sarjono, 2022). Terdapat indikasi yang sering terjadi dari kurangnya kapasitas kelembagaan dalam koordinasi serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan turut berkontribusi pada ketidakberlanjutan program, ditambah dengan dampak lingkungan yang sering terabaikan, seperti deforestasi dan hilangnya area resapan air, yang meningkatkan risiko bencana.

Kurangnya pemahaman ini dapat berujung pada pembangunan permukiman yang tidak terencana, kumuh, dan rentan terhadap masalah lingkungan serta sosial di kemudian hari (Wahyu Saputra et al., 2022). Penyamaan persepsi antara permukiman desa dan kota seringkali menimbulkan masalah, terutama karena perbedaan signifikan dalam infrastruktur, gaya hidup, dan aksesibilitas. Penyamaan ini memerlukan upaya yang lebih komprehensif, dalam rangka menciptakan komunikasi yang efektif, saling pengertian, serta kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya (Ali Akbar Harahap et al., 2024). Sosialisasi adalah salah satu upaya dan langkah penting dalam mengatasi perbedaan persepsi antara permukiman desa dan kota, terutama dalam program pembangunan. Sosialisasi membantu pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, dalam memahami konsep, tujuan, manfaat, dan tahapan program, sehingga partisipasi mereka meningkat (Abdullah, 2022). Dengan adanya sosialisasi, pemerintah dapat menjelaskan dampak program yang diharapkan dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, berdasarkan karakteristik hunian dimana mereka berada.

Mengingat urgensi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan fokus pada sosialisasi perumahan dan permukiman, dalam rangka pemahaman mendalam terkait pendekatan sudut pandang perumahan dan permukiman dalam konteks desa-kota, yang diperuntukkan bagi para pemangku kepentingan di sektor perumahan dan permukiman (Jusuf Leiwakabessy et al., 2023). Lokasi pengabdian dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Permukiman, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana khusus pada materi sosialisasi ini, *locus* dalam substansi pembahasan berada di Pulau Lombok, karena wilayah ini, dipandang sangat representatif untuk menggambarkan fenomena desa-kota, dari adanya pertumbuhan penduduk yang cepat, memiliki pusat-pusat pelayanan yang cukup banyak, serta

perkembangan kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan perumahan dan permukiman tersebar luas.

Dari adanya sosialisasi ini, sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini memiliki tujuan yang utama adalah untuk:

- Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat luas tentang regulasi dan standar perumahan dan permukiman dalam perspektif desa-kota,
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan permukiman yang baik dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan,
- Mendorong partisipasi aktif antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan permukiman yang nyaman, aman, dan sehat sesuai dengan perspektif desa kota.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang dilakukan dimulai dengan bimbingan teknis yaitu berupa pertemuan partisipatif dengan cara pemaparan, telaah/diskusi, perumusan dan penyepakatan bersama (Nany Yulianti et al., 2019) antara pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB, dengan perwakilan masyarakat yang direpresentasikan oleh pokja perumahan permukiman dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang permukiman, dengan total peserta sebanyak 27 orang, yang diundang dalam kegiatan ini.



Gambar 2. Suasana Kegiatan Sosialisasi
(Sumber : Dokumentasi Penulis, tahun 2025)

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025, bertempat di Aula Utama Pertemuan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB. Tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini meliputi:

- Persiapan: Tahap ini diawali dengan melakukan survei awal untuk mengidentifikasi sebaran dan permasalahan spesifik terkait perumahan dan permukiman yang terdapat di Pulau Lombok. Tim penyusun materi sosialisasi kemudian menyiapkan visualisasi data berupa poster, dan media visual interaktif yang relevan dengan kebutuhan kegiatan sosialisasi, dilanjutkan dengan mengisi pre-test secara digital melalui gawai masing-masing peserta yang terhubung dengan tim pelaksana sosialisasi.
- Pelaksanaan Sosialisasi: Kegiatan utama dilakukan dalam bentuk ceramah interaktif dan diskusi. Sesi sosialisasi diawali dengan pemaparan materi oleh tim pengabdian, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi untuk menggali persepsi peserta sosialisasi dan berbagi pengalaman antar peserta. Penggunaan media visual berupa peta interaktif digunakan untuk mempermudah pemahaman.

- Evaluasi: Untuk mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan sosialisasi, dilakukan post-test singkat dengan beberapa pertanyaan terkait materi, sebagai upaya umpan balik pemahaman peserta.



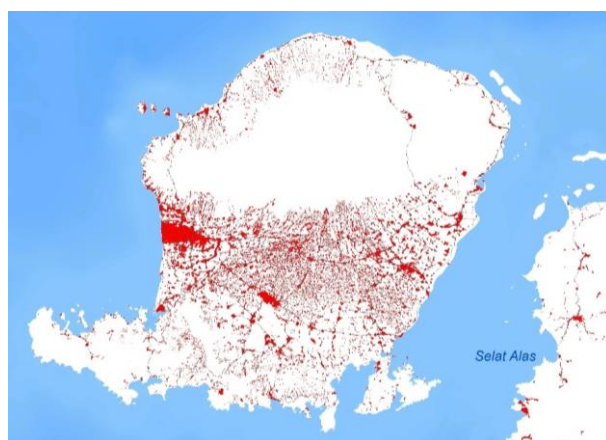
Gambar 3. Diagram Alur Kegiatan Sosialisasi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai isu perumahan dan permukiman, dengan penekanan khusus pada dinamika dan tantangan yang muncul dari interaksi antara wilayah desa dan kota. Fokus krusial lainnya adalah untuk menggali dan mengidentifikasi masalah-masalah perumahan dan permukiman yang unik akibat interaksi desa dan kota di Pulau Lombok. Ini bukan sekadar sosialisasi umum, melainkan upaya untuk memahami isu yang sedang berkembang antara lain :

- Bagaimana urbanisasi dan pertumbuhan kota pola pembangunan di desa-desa penyangga.
- Perbedaan akses terhadap informasi dan program bantuan perumahan antara masyarakat di perkotaan dan perdesaan.
- Tantangan dalam penyediaan infrastruktur dasar yang merata di seluruh spektrum desa-kota.
- Dampak perubahan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat terkait jenis dan kualitas hunian mereka.

Isu ini diangkat sebagai gambaran kepada peserta untuk melihat isu perumahan dalam gambaran yang lebih besar dan dinamis, dalam perspektif luas yaitu Pulau Lombok.



Gambar 4. Sebaran Permukiman dan Perumahan di Pulau Lombok
(Sumber : Olahan Data Penulis menggunakan Aplikasi Pemetaan Digital)

Sosialisasi ini berfokus untuk peningkatan pemahaman seluruh *stakeholder* yaitu masyarakat dan bahkan pemangku kepentingan dalam hal regulator perumahan dan permukiman, agar lebih sadar akan fakta bahwa tidak ada lagi batas tegas antara desa dan kota pada banyak wilayah di Pulau Lombok. Permasalahan perumahan di desa seringkali merupakan dampak dari perkembangan di sisi kota, dan solusinya pun memerlukan pendekatan yang terintegrasi.

1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan, dengan mengedepankan aspek edukasi yang informative, sesuai rencana yang telah dipersiapkan tim, terlihat dari antusiasme yang cukup tinggi dari peserta. Materi tentang sebaran dan pengelompokan perumahan dan permukiman di desa-kota menjadi topik yang paling menarik perhatian, terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang muncul. Ini mengindikasikan bahwa isu dan penyamaan pemahaman terkait perumahan dan permukiman di desa-kota, belum dipahami secara tuntas oleh peserta.

Tim pengabdian terlebih dahulu memaparkan materi dengan substansi yang sesuai dengan tema pengabdian yaitu perumahan dan permukiman dalam perspektif desa-kota, dimana pemaparan ini terfokus pada lokasi di Pulau Lombok.



Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan
(Sumber : Dokumentasi Penulis, Tahun 2025)

Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, yaitu keterbatasan waktu diskusi yang disebabkan oleh padatnya aktivitas harian peserta, serta adanya perbedaan tingkat pemahaman dasar di antara peserta. Namun, kendala ini dapat diatasi dengan penggunaan bahasa yang sederhana, visualisasi yang jelas, dan fasilitasi diskusi yang lebih interaktif untuk mengakomodasi berbagai level pemahaman.

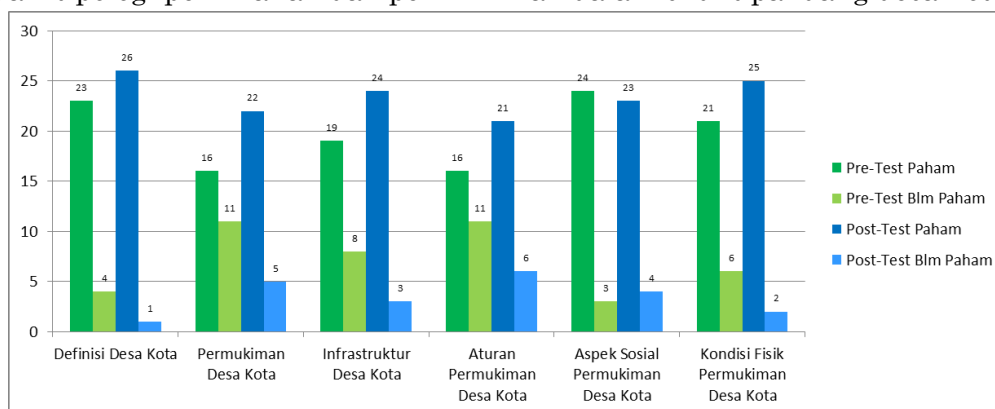
2. Perspektif Desa-Kota dalam Isu Perumahan dan Permukiman

Temuan dari sosialisasi ini memperkuat pandangan bahwa isu perumahan dan permukiman di Pulau Lombok tidak dapat dipandang secara terpisah antara desa dan kota. Dinamika interaksi desa-kota di Pulau Lombok, yang dicirikan oleh migrasi komuter, ekspansi pembangunan, dan perubahan pola konsumsi, secara langsung memengaruhi kondisi perumahan. Misalnya, tekanan pembangunan dari pusat kota, akan mendorong kenaikan harga lahan di desa-desa penyangga, membuat masyarakat lokal kesulitan memiliki tanah untuk membangun rumah. Kesenjangan dalam akses informasi dan birokrasi perizinan juga menyoroti kelemahan dalam sistem pelayanan publik yang belum sepenuhnya menjangkau wilayah desa-kota secara efektif. Materi sosialisasi yang disesuaikan ternyata sangat dibutuhkan, menunjukkan bahwa pendekatan "satu ukuran untuk semua" dalam kebijakan perumahan mungkin tidak efektif di wilayah dengan karakteristik desa-kota yang heterogen. Temuan ini

menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang struktur konfigurasi terhadap isu perumahan dan permukiman di desa-kota harus didukung oleh kebijakan yang adaptif dan infrastruktur yang merata, serta mempertimbangkan kearifan lokal dalam merespon standar pembangunan yang dibawa oleh pengaruh perkotaan.

3. Evaluasi dan Isu Kritis yang Teridentifikasi

Hasil evaluasi awal menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pemahaman perumahan dan permukiman di desa-kota. Jumlah [peserta sebanyak 27 orang, dengan hasil *pre-test*, rata-rata skor pemahaman adalah 19 peserta dengan prosentase 73,45%, sementara pada *post-test* meningkat menjadi 23 orang dengan prosentase 87,04%. Secara kualitatif, peserta mulai dapat membedakan aspek-aspek dari tipologi perumahan dan permukiman dalam sudut pandang desa-kota.



Gambar 6. Grafik evaluasi pemahaman peserta

Selama sesi diskusi, beberapa isu kritis terkait perumahan dan permukiman dalam perspektif desa-kota di Pulau Lombok berhasil teridentifikasi, antara lain:

- Maraknya konversi lahan pertanian di wilayah desa penyangga menjadi permukiman, seringkali tanpa perencanaan yang matang, menimbulkan masalah lingkungan dan sosial.
- Masyarakat di wilayah desa dan pinggiran kota masih kesulitan mengakses informasi yang jelas dan proses birokrasi yang rumit terkait perizinan pembangunan rumah dan legalitas tanah.
- Terdapat perbedaan signifikan dalam ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, jalan, listrik) antara wilayah perkotaan dan sebagian besar wilayah pedesaan.
- Masyarakat desa mulai memiliki aspirasi terhadap standar perumahan dan fasilitas yang lebih menyerupai perkotaan, yang perlu diakomodasi dalam perencanaan tanpa menghilangkan identitas lokal.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan Peningkatan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang interaktif dan disesuaikan dengan konteks lokal sangat efektif. Fenomena "desa kota" di Pulau Lombok memang menimbulkan kebutuhan informasi yang mendesak bagi masyarakat. Perubahan fungsi lahan yang cepat dan pembangunan yang tidak terencana di wilayah transisi ini seringkali menyebabkan masyarakat tidak siap menghadapi implikasi tata ruang dan

lingkungan. Dari perspektif desa kota, hasil sosialisasi ini menegaskan bahwa masyarakat di wilayah *peri-urban* menghadapi dua spektrum masalah. Di satu sisi, mereka berhadapan dengan isu-isu khas pedesaan seperti keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan dasar, di sisi lain, mereka mulai merasakan tekanan urbanisasi seperti masalah kepadatan, sanitasi perkotaan, dan kebutuhan akan regulasi yang lebih kompleks.

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya sosialisasi berkelanjutan dengan materi yang lebih spesifik, sesuai dengan sub-wilayah desa kota yang berbeda karakteristiknya. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pendekatan yang holistik dalam merancang kebijakan perumahan dan permukiman di masing-masing karakteristik wilayah, tidak hanya mengadopsi model perkotaan sepenuhnya namun juga mengakomodasi kearifan lokal dan karakteristik pedesaan yang masih ada. Peningkatan pemahaman dan partisipasi aktif peserta menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang interaktif dan disesuaikan dengan konteks lokal sangat efektif. Fenomena "desa kota" di Pulau Lombok memang menimbulkan kebutuhan informasi yang mendesak bagi masyarakat. Perubahan fungsi lahan yang cepat dan pembangunan yang tidak terencana seringkali menyebabkan masyarakat tidak siap menghadapi implikasi tata ruang dan lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Seluruh tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Provinsi NTB, kepada Fakultas Teknik – UMMAT serta kepada lembaga swadaya masyarakat yang mendukung kegiatan pengabdian ini hingga berakhir dengan hasil yang sesuai dengan harapan.

REFERENSI

- Abdullah, A. Y. S. (2022). Pendampingan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2(1), 183. <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.1.183-190.2022>
- Aframianti Naftali Papur, Yusliana, & Solikhah Retno Hidayati. (2022). Interaksi Desa Kota Pada Kota-Kota Kecil di Kawasan Pesisir DIY. *Matra*, 3(1), 11–20.
- Ali Akbar Harahap, Mailin, & Muaz Tanjung. (2024). Model Komunikasi Pemerintah dalam Mensosialisasikan dan Mewujudkan Program Padang Lawas Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(5), 2064–2077.
- Amir Abas, & Deva Fosterharoldas Swasto. (2025). Faktor Penyebab Rentannya Permukiman Desa Menjadi Permukiman Kumuh, Kabupaten Bone Bolango. *Plano Madani*, 14(1), 47–61.
- Aulia Muflih Nasution. (2019). Analisis Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Kota Medan. *JAUR (Journal of Architecture and Urbanism Research)*, 3(1), 27–46.
- Dewinta, D., & Warlina, L. (2017). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 3(02), 91–104. <https://doi.org/10.34010/jwk.v4i02.2450>
- Dyah Nawang Wulan, N., & Widodo, A. prasetyo. (2020). Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(2), 84–98. <https://doi.org/10.46730/japs.v1i2.24>

- Farida Nurul Yusrina, Meylinda Intan Sari, Golda Chomsa Asil Hudaya Pratiwi, Danang Wahyu Hidayat, Edgar Jordan, & Dwi Febriyanti. (2018). Analisis Pola Permukiman Menggunakan Pendekatan Nearest Neighbour Untuk Kajian Manfaat Objek Wisata Di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. *Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan (JGEL)*, 2(2), 111–120.
- Jusuf Leiwakabessy, Putri Indah Cahyani, & Sherly Lewerissa. (2023). Sosialisasi Pengenalan Persyaratan Rumah Yang Aman dan Layak Huni Menurut SDGs (Sustainable Development Goals) . *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia (JPPMI)*, 2(4), 26–32.
- Mas'odi Mas'odi, Ika Devy Pramudiana, Sri Roekminiati, & Nihayatus Sholichah. (2025). Keberlanjutan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) : Solusi Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya. *Journal of Management and Social Sciences*, 4(1), 148–164. <https://doi.org/10.55606/jimas.v4i1.1744>
- Nany Yuliasuti, Asnawi, Ragil Haryanto, Wisnu Pradoto, & Sunarti. (2019). Sosialisasi Pendataan Perumahan Berbasis Tabungan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). *JURNAL PASOPATI - Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 1(3), 144–149.
- Pradana, A. C., Soedwiwahjono, S., & Nurhadi, K. (2021). Fenomena Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Perumahan: Studi Kasus Kawasan Peri-Urban Kecamatan Colomadu. *Desa-Kota*, 3(1), 24. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v3i1.37622.24-35>
- Primadianti, N., & Sugiyanto, C. (2020). Ketimpangan Regional, Pertumbuhan Ekonomi Pro Poor, Dan Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.14710/jdep.3.1.1-20>
- Sari, A. R. S., & Ridlo, M. A. (2022). Studi Literature : Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 160. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20022>
- Simamora, J., & Andrie Gusti Ari Sarjono. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 59–73. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>
- Wahyu Saputra, Sukmaniar, & Hapiz Hermansyah, M. (2022). Permukiman Kumuh Perkotaan: Penyebab, Dampak Dan Solusi. *Environmental Science Journal (Esjo) : Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12–17. <https://doi.org/10.31851/esjo.v1i1.10929>
- Wijaya, M., Wahab, N. B. A., & Prihatin, P. S. (2025). Perbandingan Kebijakan dan Implementasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perdesaan di Indonesia dan Malaysia. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(1), 388–397. <https://doi.org/10.70609/icom.v5i1.6629>